

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

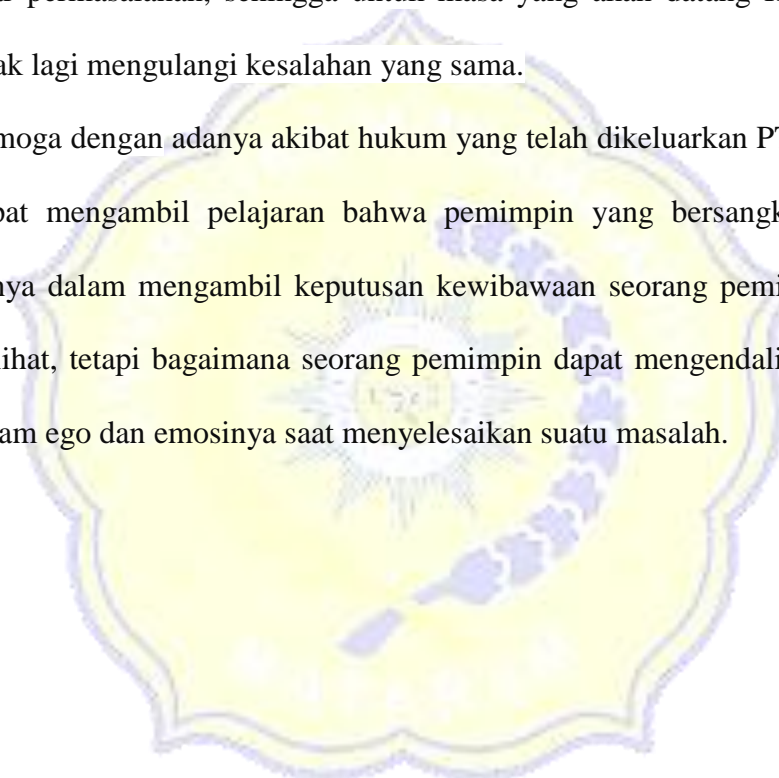
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Surat Keputusan Nomor: 07 Tahun 2019 oleh Kepala Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dinyatakan cacat hukum karena tidak memenuhi syarat administratif, kepala desa bertindak tidak sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan Undang-Undang, serta peraturan yang ada, dan dasar yang digunakan terhadap pengeluaran surat keputusan tersebut tidak memiliki dasar sesuai peraturan, dalam arti kepala desa hanya melihat kinerja perangkat desa, serta adanya desakan dari masyarakat. Kinerja kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
2. Hasil putusan PTUN Nomor: 50/G/2019/PTUN.Mtrm tentang akibat hukum dari dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor: 07 Tahun 2019 oleh Kepala Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah yaitu:
  - a. Mewajibkan Kepala Desa untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 07 Tahun 2019 Tentang Mutasi Perangkat Desa, Tertanggal 17 Juni 2019.
  - b. Memerintahkan Kepala Desa untuk mengembalikan Perangkat Desa kepada jabatan dan kedudukan semula.

- c. Menghukum Kepala Desa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

## **B. Saran**

1. Diharapkan Kepala Desa mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik jabatan yang seharusnya ketika mengeluarkan Surat Keputusan atau menjalankan pemerintah sebaiknya lebih dipahami dan diteliti lagi dari akar permasalahan, sehingga untuk masa yang akan datang Kepala Desa tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama.
2. Semoga dengan adanya akibat hukum yang telah dikeluarkan PTUN.matrm dapat mengambil pelajaran bahwa pemimpin yang bersangkutan, tidak hanya dalam mengambil keputusan kewibawaan seorang pemimpin dapat terlihat, tetapi bagaimana seorang pemimpin dapat mengendalikan dirinya dalam ego dan emosinya saat menyelesaikan suatu masalah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Alex Sumanji Nitisemito, 1996. *Manajemen Personalia : Sumber Daya Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, 2010. "*Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*", Bandung.
- Hamzah, Halim, Kemal Redindo, 2009. "*Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*" Kencana Media Group, Jakarta.
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* Jakarta: Erlangga.
- Hasibuan, Malayu, 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, 2002, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota. Disertasi, PPS*, Fisip UI, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2015. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Malang, Setara Press.
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kadarisman, 2012. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Kartoehadikoesoemoe, Soetardjo, 2009 "Desa" Balai pustaka Universitas Michigan
- Mashuri Maschab, 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Yogyakarta: POIGov Fisipol UGM
- Pipin Syarifin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Pustaka Setia, Bandung.
- R. Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sirajuddin dan Winardi, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, wisma Kalimetro Malang, Jatim.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Perss.

Widjaja, 2010, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Yusnani Hasyimzoem, dkk, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

### **Peraturan Perundangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Hierarki Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

### **Jurnal**

Fina Sinarita dkk, 2013, “*Analisa Kebijakan Pengangkatan Sekretaris Desa (SEKDES) Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kabupaten Demak*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Semarang.

M. Farid Ridha dan Sujianto, 2013, “*Kebijakan Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadai PNS*”, Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah.

Muhammad Fachrudin, 2011. *Analisis Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Menajdi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Kabupaten Grobogan*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Semarang.

**Website**

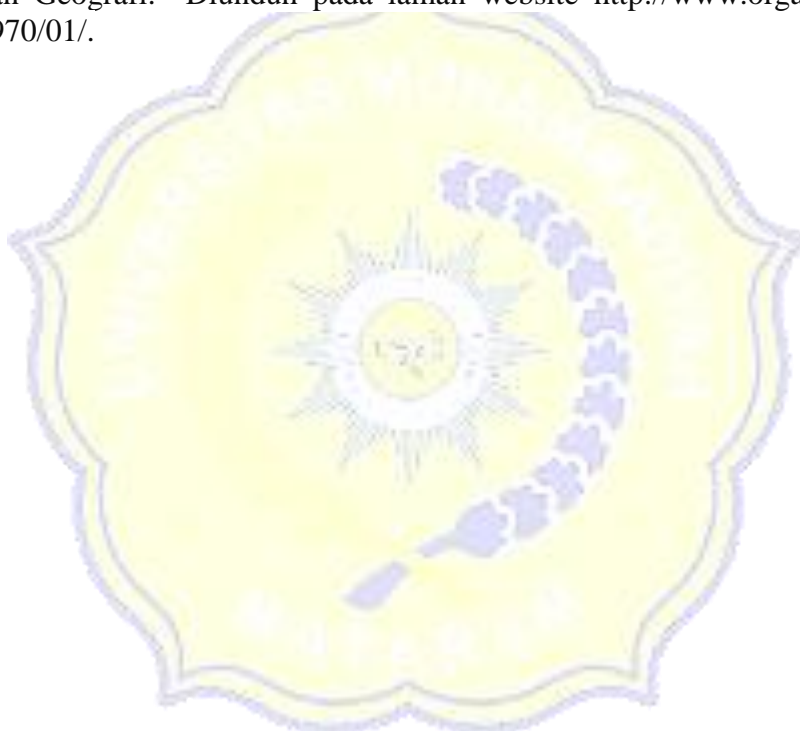
<https://tugaskuliah0601.blogspot.com/2016/10/pengembangan-karyawan-dan-mutasi-pegawai.html?m=1>

<https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 17 November 2019 pukul 23:24 wita.

<https://www.suarantb.com/dimutasi-staf-desa-sukarara-demo-kades/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Offline. Diunduh pada laman website: <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>

Pengertian, Arti dan Definisi Desa dan Kota –Belajar Pelajaran Ilmu Sosiologi dan Geografi. Diunduh pada laman website <http://www.organisasi.org/1970/01/>.







**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**  
**TERAKREDITASI**

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

**KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI**

NAMA : ARLIN YUNI ARBIANTI  
 NIM : 61711001  
 PROG. STUDI : ILMU HUKUM  
 PK : \_\_\_\_\_  
 DOSEN PS I : Fitriani Amalia, S.H., M.H. DOSEN PS II : Anes Prima Dewi, S.H., M.H.

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
	5/01/21	perbaiki format tulisan, spasi jenis huruf		
1	11/01/21	Perbaikan BAB I, spasi, Penulisan.		
3	27/01/21	perbaikan jenis penulisan BAB III		
4.	02/02/21	ACC proposal		
5.	03/02/21	perbaiki BAB II, metode penulisan		
6.	09/02/21	ACC proposal		
7.	08/02	Acc skripsi		

Mengetahu  
 Dekan/ Ketua Prodi,

NIDN. \_\_\_\_\_



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**  
**TERAKREDITASI "B"**

Website : <http://www.fh.ummat.ac.id> Email : [fakum.umm@gmail.co.id](mailto:fakum.umm@gmail.co.id)  
 Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Pagesangan Mataram  
 Nusa Tenggara Barat

Nomor : 45 /II.3.AU/05/F/II/2021  
 Lamp : -  
 Hal : **Mohon Ijin Penelitian**

Kepada  
 Yth. : **Kepala Desa Sukarara Kec. Jonggat, Lombok Tengah**  
 di-  
**Tempat**

*Bismillahirromanirrohim*  
*Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

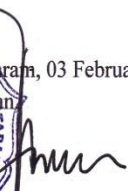
Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada kita sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Dengan hormat, untuk keperluan penelitian dalam rangka menyelesaikan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan Ijin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian.

- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama             | : | Arlin Yuni Arbianti   |
| 2. No. Mahasiswa    | : | 617110001   |
| 3. Semester         | : | VII ( Tujuh )   |
| 3. Program Studi    | : | Ilmu Hukum  |
| 4. Konsentrasi      | : | HTN   |
| 5. judul Penelitian | : | "Kewenangan Kepala Desa Dalam Mutasi Sekretaris Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014." |

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.

*Wabillahittaufiq Wallhidayah*  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Mataram, 03 Februari 2021  
 Dekan  
  
**Rena Aminwara, SH., M.Si**  
 NIDN. 0828096301